

STRATEGI PENGENTASAN KELAPARAN DI INDONESIA MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Oleh:

Wahid Paruza (2008204068) *wahidparuza@gmail.com*

Rivaldi Firdaus (2008204071) *rivaldi181@gmail.com*

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Sustainable Development Goals (SDG's) adalah program pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, yang memiliki 17 Tujuan diantaranya yaitu pengentasan kelaparan. Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kelaparan di Indonesia serta variabel-variabel yang diduga memengaruhinya dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menggunakan grafik dan atau tabel. Para Stakeholder penggiat SDGs saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat.

PENDAHULUAN

Kemajuan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dunia membuat ekonomi semakin maju dan berkembang pesat, tetapi karena kemajuan ekonomi yang sangat pesat itu juga membuat sebuah permasalahan baru terutama untuk lingkungan sekitar kita. Banyak aktivitas ekonomi yang merusak alam semesta, itulah yang mendorong Negara-negara di dunia sepakat untuk membuat suatu program untuk kehidupan yang lebih baik atau tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Program ini adalah kelanjutan dari program Millenium Development Goal's (MDG's) yang mempunyai 17 tujuan diantaranya yaitu pengentasan kelaparan.

Pengentasan Kelaparan ini penting untuk mencegah kematian karena kelaparan, atau sesuatu yang diakibatkan karena kelaparan misalnya penyakit busung lapar, stunting, dsb. Pada Penelitian kali ini kami akan mencoba untuk mengupas lebih dalam tentang apa itu kelaparan? Bagaimana Kelaparan di Indonesia? Bagaimana Cara Islam mengatasi kelaparan ?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari sumber pustaka yang ada di jurnal-jurnal di internet dan juga sumber-sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini

PEMBAHASAN

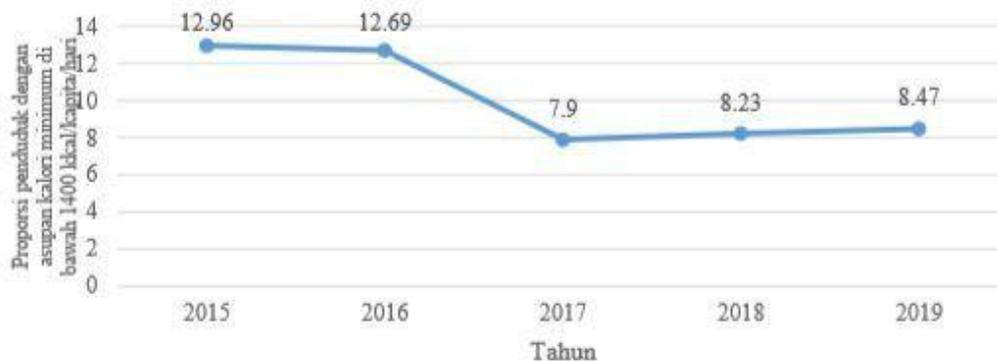
A. PENGERTIAN KELAPARAN

Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik (Aziz, et al, 2023). Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan.(Hamzah 2012)

Kelaparan serta kurang gizi tidak hanya menyerang anak kecil tetapi juga orang dewasa (Aziz & Nur'aisah, 2021). Kelaparan kronis dapat menyebabkan: 1) tingginya tingkat kematian bayi; 2), rentan terhadap penyakit; 3) gangguan pertumbuhan dan kependaian. (Mereyana Lusandri Numberi dkk 2021).

Permasalahan kelaparan sudah menjadi masalah yang selalu diusahakan pemerintah agar dapat segera teratasi (Aziz, 2021). Penanggulangan kelaparan perlu mendapat perhatian penting oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakatnya dan sebagai bentuk pelaksanaan dari komitmen global melalui Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mencapai kesejahteraan rakyat(Mone, D. M., & Utami, E. D. 2021)

B. KELAPARAN DI INDONESIA

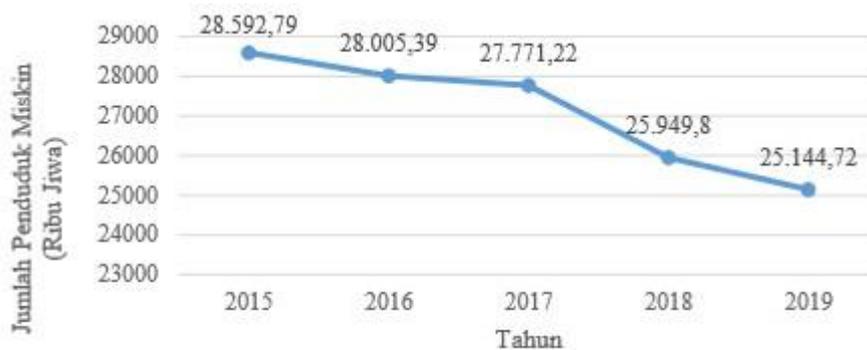


Gambar 2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari di Indonesia tahun 2015-2019.

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2015, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari di Indonesia sebesar 12,96 persen dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2016 menjadi 12,69 persen. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017 dimana proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari di Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,79 persen hingga mencapai 7,9 persen. Hal ini disebabkan karena adanya transformasi bertahap dari subsidi Rastra menjadi BNPT pada tahun 2017. Transformasi yang dilakukan pemerintah ini membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sekaligus membantu dalam pemenuhan gizi yang lebih seimbang (Bakhri, et al, 2023).

Di tahun 2018, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari di Indonesia kembali mengalami peningkatan secara perlahan hingga mencapai 8,47 persen pada tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustyn et al. (2007) yang mengatakan bahwa salah satu faktor potensial yang memicu permasalahan pemenuhan pangan di daerah terpencil adalah aksesibilitas. Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran rata-rata perkapita perbulan lebih rendah dari garis kemiskinan (Bakhri, et al, 2021). Berdasarkan gambar 4, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 1.821.420 jiwa. Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan upah riil buruh tani per hari, kenaikan nilai tukar petani (NTP), inflasi yang cukup rendah serta pemberian bantuan kesehatan, pendidikan, dan bantuan pangan dari pemerintah. Bantuan pemerintah dan gejolak harga komoditas pangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah ini membuat laju kenaikan garis kemiskinan bisa ditekan dan daya beli masyarakat bisa terbantu sehingga jumlah penduduk miskin mengalami penurunan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

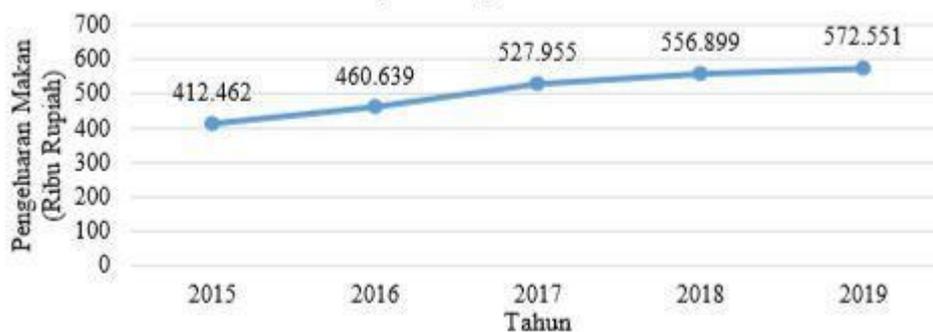
Gambar 4. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2019 (Ribu Jiwa).

Pendapatan Perkapita pada penelitian ini akan didekati menggunakan nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010. Nilai pendapatan perkapita Indonesia cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, nilai pendapatan perkapita Indonesia sekitar 35,16 juta rupiah dan terus meningkat hingga menjadi 40,84 juta rupiah pada tahun 2019. Berdasarkan gambar 5, diketahui bahwa peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2019, peningkatan ini disebabkan karena menurunnya tingkat pengangguran terbuka, meningkatnya pembangunan infrastruktur, dan peningkatan modal.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 5. PDRB Perkapita ADHK (Seri 2010) Indonesia Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) Pada umumnya, terdapat dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran guna pembelanjaan makan dan bukan makan. Berdasarkan gambar 6, sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 pengeluaran makanan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan pengeluaran makanan terbesar terjadi pada tahun 2017, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 67.316,8 atau sebesar 14,61 persen, peningkatan pengeluaran makan ini terjadi karena naiknya harga bahan makanan di Indonesia, terlebih saat akhir tahun. Tercatat inflasi bahan makanan di bulan Desember 2017 bahkan mencapai 2,26 persen secara bulanan.



C. LANGKAH PEMERINTAH MENGENTASKAN KELAPARAN

Bagi Indonesia sendiri, kemiskinan masih merupakan persoalan yang menjadi beban berat, terutama dikaitkan dengan isui kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Sebagai bagian dari anggota PBB Indonesia tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan deklarasi SDGs (Dharmayanti & Aziz, 2024). Itu artinya Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut. Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan secara integratif sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 1995, yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden. Upaya nasional ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi

masalah yang serius. Bahkan pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa, sekitar 47 triliun. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan (Fatmasari, et al, 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Ishartono & Santoso Tri Raharjo, 2016) Pada Program Pengentasan Kelaparan dapat dilakukan dengan cara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan lansia (Fatmawati, et al, 2022).

D. SOLUSI UNTUK PENGENTASAN KELAPARAN

Dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam meniadakan zero hunger (tanpa kelaparan) memiliki beberapa acuan dimulai dari targetnya yaitu terdapat 8 target, 9 publikasi, 21 acara dan 766 tindakan (Haerisma, et al, 2023). Ada pun topik yang berkaitan dengan tujuan ini adalah pembangunan pedesaan serta ketahanan pangan dan nutrisi serta pertanian berkelanjutan (Harjadi, et al, 2021). Berikut penjelasan tentang target dan juga indikator dalam tujuan zero hunger

No.	Target	Indikator
1	Pada tahun 2030, akhiri kelaparan dan pastikan akses semua orang, khususnya orang miskin dan orang yang berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, ke makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Prevalensi kekurangan gizi. ➢ Prevalensi kerawanan pangan sedang atau parah pada populasi, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan (FIES).
2	Pada tahun 2030, mengakhiri semua bentuk malnutrisi, termasuk malnutrisi kronis, pada tingkat nasional	➢ Prevalensi stunting (tinggi)
	2025, target yang disepakati secara internasional tentang stunting dan wasting	deviasi dari median Standar Pertumbuhan Anak Organisasi

	pada anak di bawah usia 5 tahun, dan mengatasi kebutuhan gizi remaja putri, wanita hamil dan menyusui, serta lansia	Kesehatan Dunia (WHO) pada anak di bawah usia 5 tahun . > Prevalensi malnutrisi (berat badan untuk tinggi badan > +2 atau <-2 standar deviasi dari median Standar Pertumbuhan Anak WHO) pada anak di bawah usia 5 tahun, menurut jenis (kurus dan kelebihan berat badan).
3	Pada tahun 2030, menggendakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara ke tanah, sumber daya dan input produktif lainnya, pengetahuan, layanan keuangan, pasar dan peluang untuk nilai tambah dan pekerjaan nonpertanian	> Volume produksi per unit tenaga kerja menurut kelas ukuran usaha pertanian / pastoral / kehutanan . > Pendapatan rata-rata produsen makanan skala kecil, menurut jenis kelamin dan status adat
4	Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu memelihara ekosistem, yang memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana	> Proporsi luas lahan pertanian di bawah pertanian produktif dan berkelanjutan
	lainnya serta yang secara progresif meningkatkan kualitas tanah dan tanah	
5	Pada tahun 2020, menjaga keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih	> Jumlah sumber daya genetik tumbuhan dan hewan untuk pangan dan pertanian yang diamankan baik dalam sarana

	dan tanaman yang dikelola dengan baik dan terdiversifikasi di tingkat nasional, regional dan internasional, dan mempromosikan akses ke dan yang adil dan merata. berbagi manfaat yang timbul dari pemanfaat sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana disepakati secara internasional	konservasi jangka menengah maupun jangka panjang. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Proporsi breed lokal yang diklasifikasikan sebagai beresiko, tidak beresiko atau pada tingkat resiko kepunahan yang tidak diketahui.
6	Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, dalam infrastruktur pedesaan, penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen tanaman dan ternak dalam rangka meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indeks orientasi pertanian untuk pengeluaran pemerintah. ➤ Total arus resmi (bantuan pembangunan resmi ditambah arus resmi lainnya) ke sektor pertanian.
7	Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi perdagangan di pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan paralel semua bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek yang setara, sesuai dengan mandat Putaran Pembangunan Doha.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkiraan Dukungan Produsen . ➤ Subsidi ekspor pertanian.
8	Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan dan turunannya dan memfasilitasi akses tepat waktu ke informasi pasar, termasuk tentang cadangan pangan, untuk membantu membatasi ketidakstabilan harga pangan yang ekstrim.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator anomali harga pangan.

Salah satu acara yang digelar untuk menunjang tujuan zero hunger adalah kondisi ketahanan pangan dan gizi dunia 2021 (SOFI) yang memiliki latar belakang Laporan Status Ketahanan Pangan dan Gizi di Dunia 2021 (SOFI 2021) menyajikan penilaian global berbasis bukti pertama tentang kerawanan pangan kronis pada tahun pandemi COVID-19 muncul dan menyebar ke seluruh dunia. Laporan SOFI 2021 juga akan fokus pada solusi sistem pangan pendamping yang mengatasi pendorong utama kerawanan pangan dan malnutrisi, yaitu konflik, variabilitas iklim dan ekstrem, perlambatan dan kemerosotan ekonomi, dan COVID-19, dan yang

memastikan akses ke pola makan sehat yang terjangkau. semua. Ini akan melihat secara mendalam pada enam jalur transformatif untuk mencapai ini, memanfaatkan praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik dari seluruh dunia (Harjadi, et al, 2023).

Adapun salah satu dampak pandemi terhadap penerapan tujuan ke 2 (zero hunger) terhadap gizi anak sebagai berikut : “Tindakan mendesak sangat diperlukan untuk melindungi status gizi anak-anak yang paling rentan selama pandemi” Gizi kurang kronis, atau stunting, membuat anak-anak berisiko lebih besar meninggal akibat infeksi umum; itu juga terkait dengan perkembangan kognitif yang buruk. Proporsi anak di bawah usia 5 tahun yang menderita stunting menurun dari 32 persen pada tahun 2000 menjadi 23 persen pada tahun 2015 dan 21 persen pada tahun 2019. Namun, 144 juta anak di bawah usia 5 tahun masih mengalami stunting pada tahun 2019. Tiga perempatnya dari anak-anak ini tinggal di dua wilayah: Asia Selatan (39 persen) dan Afrika sub-Sahara (36 persen). Upaya lebih intensif diperlukan untuk mencapai target global menurunkan jumlah anak stunting menjadi 99 juta pada tahun 2025 dan menjadi 82 juta pada tahun 2030. Pada 2019, 6,9 persen (atau 47 juta) anak di bawah usia 5 tahun terkena wasting, atau kekurangan gizi akut, suatu kondisi yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang terbatas dan infeksi. Ini jauh di atas target global 5 persen untuk tahun 2025, dan target global 3 persen untuk tahun 2030. Lebih dari separuh anak-anak yang menderita wasting tinggal di Asia Tengah dan Selatan, satu-satunya wilayah dengan prevalensi lebih dari 10 persen (Layaman, et al, 2021).

Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini berada pada risiko yang lebih tinggi selama krisis saat ini karena akses yang terbatas ke makanan bergizi dan layanan nutrisi penting. “Insiden kelebihan berat badan pada anak kecil terus meningkat, tanda peringatan untuk masalah kesehatan di masa depan” Kelebihan berat badan pada anak diakui sebagai masalah kesehatan masyarakat global karena pengaruhnya yang merusak terhadap kejadian penyakit akut dan kronis, perkembangan yang sehat dan produktivitas ekonomi individu dan masyarakat. Pada 2019, 5,6 persen (atau 38 juta) anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia kelebihan berat badan. Prevalensi global saat ini mewakili tingkat keparahan sedang, menandakan bahwa tindakan pencegahan sangat dibutuhkan untuk populasi termuda (Jaelani, et al, 2021). Kegemukan dan kurus sering terjadi bersamaan dalam suatu populasi, dan dianggap sebagai beban ganda malnutrisi. Misalnya, di Afrika Utara dan Asia Tenggara, prevalensi kurus masing-masing adalah 7,2 persen dan 8,2 persen, pada 2019, sementara kelebihan berat badan adalah 11,3 persen dan 7,5 persen.

E. LANGKAH ISLAM MENGENTASKAN KELAPARAN

Pada perkembangannya, terutama di Indonesia, para Stakeholder penggiat SDGs saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat.

Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs (Nasir, et al , 2022) Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs. Hal ini juga didukung oleh potensi zakat, infak, sedekah (ZIS) yang sangat besar di Indonesia. BAZNAS mencatat bahwa perkembangan zakat, infak, sedekah di Indonesia selalu meningkat dengan pesat setiap tahunnya. Hal ini tentunya bisa menjadi peluang yang sangat baik jika dana zakat, infak, dan sedekah bisa dioptimalkan dan dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat (Wadud & Layaman, 2023).

Grafik berikut menunjukkan tren penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia pada tahun 2012-2019.

Grafik 1. Penghimpunan Zakat Nasional 2012-2019



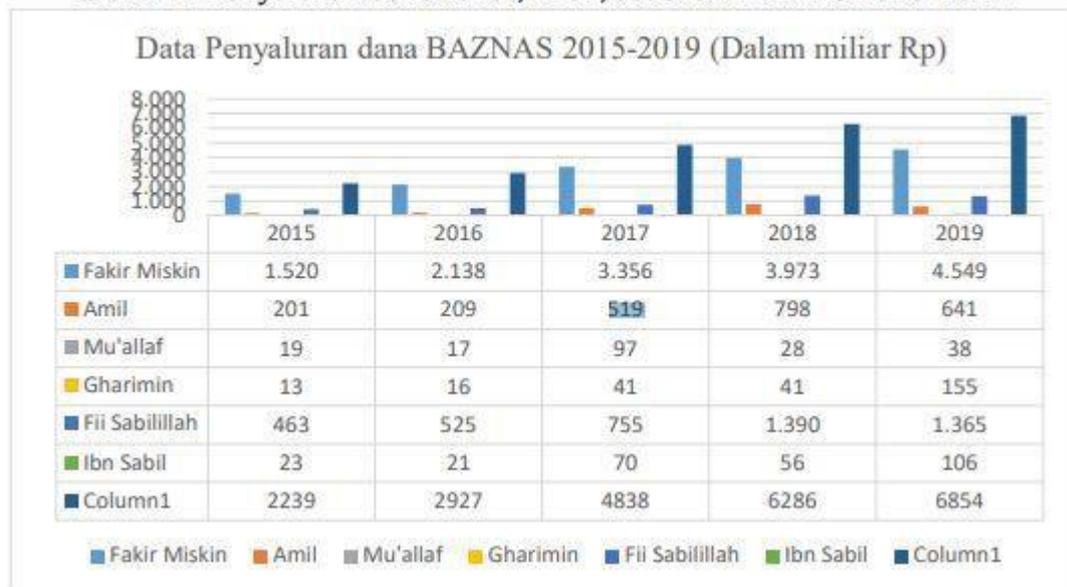
Sumber: Statistik Zakat Nasional 2013-2020 (diolah)

Grafik di atas menggambarkan tren penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada tahun 2018 mencapai Rp 8.117 Miliar dan meningkat pada tahun 2019 sebesar Rp 10.227 Miliar. Alokasi dana zakat, infak, sedekah nasional tersebut didistribusikan kepada bidang-bidang, di antaranya sosial kemanusiaan (26,51%), pendidikan (31,28%), ekonomi (18,30%), dakwah (15,53%), dan kesehatan (8,39%). Penyaluran dana zakat secara nasional kurang lebih telah menysasar 6,806,175 jiwa mustahiq. Dari aneka aktivitas pengumpulan dan penyaluran dengan variasinya, kerja-kerja zakat termasuk organisasi- organisasi pengelolanya berupaya untuk mencapai tujuan dari zakat yaitu untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya para mustahiq/orang-orang yang berhak atas zakat (Wartoyo & Haerisma, 2022)

Pengelolaan zakat secara umum dilakukan melalui program-program dan kegiatan, yang jika dikelompokkan ke dalam bidang-bidang, berupa

program santunan/ layanan bantuan langsung yang bersifat konsumtif, program pendidikan, program kesehatan, program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat, serta program kedaruratan. Potensi keterkaitan dan irisan antara zakat dengan SDGs tidak hanya pada program, melainkan juga dengan para pelaku yang mungkin terlibat, di samping SDGs juga mensyaratkan adanya kerjasama di antara multi stakeholder di masyarakat (Wartoyo, et al, 2022) Keterkaitan lainnya juga mungkin muncul dari pendekatan dan cara pengelolaan program, alokasi sumber daya, para beneficiaries/penerima program zakat, hingga pertanggungjawaban dan akuntabilitas di dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, khusus di dalam Pasal 3 di UU yang sama menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Bahkan lebih spesifik pada tujuan ke-6 pembangunan berkelanjutan yaitu air bersih dan sanitasi, telah dilakukan kesepakatan kerjasama berupa MoU antara Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) di dalam memberikan dukungan pada program air bersih dan sanitasi/Clean Water and Sanitation tersebut (Yusuf, et al, 2021)

Grafik 2. Penyaluran dana zakat, infak, sedekah BAZNAS 2015-2019



Sumber: Annual Report Baznas 2015-2019 (Diolah)

Grafik di atas dapat dilihat data penyaluran dana zakat, infak, sedekah selama tahun 2015-2019, dimana penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang paling besar pada tahun 2019 disalurkan kepada fakir dan miskin (Rp. 4.549 miliar), diikuti oleh fii sabilillah (Rp. 1.365 miliar), dan amil (Rp. 641 miliar).

Dari penyaluran tersebut di turunkan ke dalam beberapa bentuk program yang sangat berperan terhadap beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu, (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kesehatan yang baik, (4) pendidikan bermutu (6) air bersih dan sanitasi yang layak, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (10) mengurangi ketimpangan. Peranan zakat, infak, dan sedekah terhadap tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penghimpun dana zakat di Indonesia (Yasin, et al, 2023). Grafik berikut ini dapat menjelaskan bagaimana tren penyaluran zakat secara keseluruhan dari target-target penyaluran zakat. (Rizky Putra Utama 2021).

PENUTUP

Kesimpulan

Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan.

Pada Program Pengentasan Kelaparan dapat dilakukan dengan cara Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan lansia.

Langkah Islam Mengatasi Kelaparan dan beberapa permasalahan ekonomi lainnya adalah dengan Badan Amil Zakat Infaq Sedekah dsb

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*.
- Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Business and Management*.
- Aziz, A., Syam, R. M. A., Hasbi, M. Z. N., & Prabuwono, A. S. (2023). Hajj Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 544-567.
- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.
- Bakhri, S., Nurbaiti, F., & Yusuf, A. A. (2023). The Most Influential Factors On Stock Prices In The JII Index. *Jurnal Manajemen*, 27(3), 612-631.
- Development Goals Di Indonesia. *Kutubkhanah*, 21(2).

- Dharmayanti, D. ., & Aziz, A. . (2024). Transaction Halal Supply Chain Management (HSCMT) in the Digital Economy Era An Opportunity and a Challenge In Indonesia . *Migration Letters*, 21(4), 1410–1419. Retrieved from <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/8086>
- Fatmasari, D., Harjadi, D., & Hamzah, A. (2022). ERROR CORRECTION MODEL APPROACH AS A DETERMINANT OF STOCK PRICES. *TRIKONOMIKA*, 21(2), 84-91.
- Fatmawati, P. N., Jaelani, A., & Rokhlinasari, S. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance. *American Journal of Current Education and Humanities*, 1(01), 44-63.
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda’s Maqasid Syari’ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298-316.
- Hamzah, A. (2012). Policy tackling the poorness and hunger in Indonesia: Reality and study. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(1), 8251.
- Harjadi, D., Arraniri, I., & Fatmasari, D. (2021). The role of atmosphere store and hedonic shopping motivation in impulsive buying behavior. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 14(2), 46-52.
- Harjadi, D., Fatmasari, D., & Hidayat, A. (2023). Consumer identification in cigarette industry: Brand authenticity, brand identification, brand experience, brand loyalty and brand love. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(2), 481-488.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Jaelani, A., Firdaus, S., Sukardi, D., Bakhri, S., & Muamar, A. (2021). Smart City and Halal Tourism during the Covid-19 Pandemic in Indonesia/Cidade Inteligente e Turismo Halal durante a Pandemia Covid-19 na Indonésia.
- Layaman, L., Harahap, P., Djastuti, I., Jaelani, A., & Djuwita, D. (2021). The mediating effect of proactive knowledge sharing among transformational leadership, cohesion, and learning goal orientation on employee performance. *Business: Theory and Practice*, 22(2), 470-481.
- Mone, D. M., & Utami, E. D. (2021, November). Determinan Kelaparan di Indonesia
- Nasir, A., Busthomi, A. O., & Rismaya, E. (2022). Shariah Tourism Based on Local Wisdom: Religious, Income, Motivation, Demand and Value of Willingness to Pay (WTP). *International Journal Of Social Science And Human Research*, 5(08), 3811-3816.
- Numberi, M. L., Sumule, A. I., & Tjolli, I. (2021). Aspek-Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Desa (Studi Kasus Kampung Wamesa dan Warkomi di Distrik Manokwari Selatan). *Jurnal Kehutanan Papuasiasia*, 7(1), 26-40.
- Saputri, W., Andryan, W., & Khodijah, D. P. I. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SDGs 2030: Zero Hunger (Goal2). Tahun 2015-2019. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2021, No. 1, pp. 547-546)
- Utama, R. P. (2021). Peran Zakat, Infak, Sedekah Dalam Mewujudkan Sustainable Wadud, A. M. A., & Layaman. (2023). The Impact of Islamic Branding on Customer Loyalty with Customer Satisfaction as an Intervening Variable. In *Islamic*

Sustainable Finance, Law and Innovation: Opportunities and Challenges (pp. 95-104). Cham: Springer Nature Switzerland.

Wartoyo, Kholis, N., Arifin, A., & Syam, N. (2022). The Contribution of Mosque-Based Sharia Cooperatives to Community Well-Being Amidst the COVID-19 Pandemic. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(1), 21-45.

Wartoyo, W., & Haerisma, A. S. (2022). Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(1), 110-139.

Yasin, A. A., Salikin, A. D., Jaelani, A., & Setyawan, E. (2023). Sustainability Of Muslim Family Livelihoods In The Perspective Of Sustainable Development Goals. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6).

YUSUF, A. A., SANTI, N., & RISMAYA, E. (2021). The Efficiency of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 239-247.